

Pangkalan Laut Kuno sebagai Warisan Geopolitik: Perbandingan Parthia, Sriwijaya, dan Majapahit

Yudi Subiantoro^{1*}, Livia Ersi²

Program Studi Sejarah, Unhan RI

Corresponding Author's e-mail : yudisubiantoro.mail@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 4, Agustus 2026

Page: 2235 - 2243

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/3258>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.3258>

Article History:

Received: 07-07-2026

Revised: 12-08-2026

Accepted: 19-08-2026

Abstract : *The archaeological discovery of a Parthian naval base in Minab, Hormozgan Province, Iran, provides new insights into the development of maritime geopolitical strategies in the ancient world. This study aims to examine the strategic similarities and differences among the Parthian Empire, the Srivijaya Empire, and the Majapahit Empire within the framework of the Maritime Silk Road. A qualitative approach was employed by integrating comparative historical analysis, military geography, and multidisciplinary perspectives based on archaeological, epigraphic, textual, and maritime historical sources. The analysis focuses on three principal variables: the control of maritime chokepoints, the role of naval bases as geopolitical instruments, and the relationship between maritime economic power and naval protection. The findings reveal that all three civilizations established permanent maritime infrastructure at strategically important locations to control trade routes, project military power, and support economic stability through maritime surveillance and fiscal functions. Despite adopting different models of maritime governance—Parthia emphasizing coastal defense, Srivijaya operating as a thalassocracy, and Majapahit integrating agrarian and maritime power—they shared a common geopolitical pattern in utilizing naval bases as strategic state instruments. This study concludes that naval bases constituted an essential component of maritime geopolitical strategy for more than two millennia and offers a conceptual framework for advancing maritime defense archaeology in Indonesia.*

Keywords : *Parthia; Srivijaya; Majapahit; naval base; maritime chokepoint; maritime geopolitics; Maritime Silk Road; defense archaeology.*

Abstrak : Temuan arkeologi pangkalan angkatan laut era Kekaisaran Parthia di Minab, Provinsi Hormozgan, Iran, memberikan perspektif baru mengenai perkembangan strategi geopolitik maritim pada masa kuno. Penelitian ini bertujuan menganalisis persamaan dan perbedaan strategi maritim Parthia, Sriwijaya, dan Majapahit melalui pendekatan sejarah komparatif dalam konteks Jalur Sutra Maritim. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan memadukan pendekatan sejarah komparatif, geografi militer, dan analisis multidisipliner terhadap sumber arkeologis, epigrafis, tekstual, serta literatur sejarah maritim. Analisis difokuskan pada tiga variabel utama, yaitu penguasaan maritime chokepoint, fungsi pangkalan laut sebagai instrumen geopolitik, dan hubungan antara kekuatan ekonomi dengan perlindungan militer di laut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga peradaban mengembangkan infrastruktur maritim di lokasi strategis untuk mengendalikan jalur perdagangan, memproyeksikan kekuatan militer, dan mendukung stabilitas ekonomi melalui pengawasan pelayaran serta fungsi fiskal. Meskipun memiliki model kekuasaan yang berbeda—Parthia berorientasi pada pertahanan pesisir, Sriwijaya menerapkan sistem thalassocracy, dan Majapahit mengintegrasikan kekuatan agraris dan maritim—ketiganya memperlihatkan pola geopolitik yang serupa dalam pemanfaatan pangkalan laut sebagai instrumen negara. Penelitian ini menegaskan bahwa pembangunan pangkalan laut merupakan

bagian dari tradisi geopolitik maritim yang telah berkembang sejak lebih dari dua milenium serta memberikan kerangka konseptual bagi pengembangan kajian arkeologi pertahanan maritim di Indonesia.

Kata Kunci : Parthia; Sriwijaya; Majapahit; pangkalan angkatan laut; chokepoint maritim; geopolitik; Jalur Sutra Maritim; arkeologi pertahanan

PENDAHULUAN

Penemuan situs pangkalan angkatan laut era Kekaisaran Parthia di Minab, Provinsi Hormozgan, Iran, pada 2025–2026 memberikan bukti baru mengenai pentingnya infrastruktur maritim dalam strategi geopolitik dunia kuno. Struktur benteng, pelabuhan kuno, dan bekas teluk yang ditemukan menunjukkan bahwa kawasan tersebut bukan sekadar pelabuhan perdagangan, melainkan pangkalan militer yang dirancang untuk mengawasi jalur pelayaran di Selat Hormuz. Sebagai salah satu *maritime chokepoint* terpenting di dunia, Selat Hormuz telah memiliki nilai strategis sejak lebih dari dua milenium lalu sehingga penguasaan terhadap kawasan tersebut menjadi faktor penting dalam pengendalian perdagangan internasional dan proyeksi kekuatan militer.

Dalam konteks sejarah maritim global, temuan tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan perkembangan kerajaan-kerajaan maritim di Asia Tenggara. Sriwijaya pada abad ke-7 hingga ke-13 M menguasai Selat Malaka dan Selat Sunda sebagai jalur utama perdagangan internasional, sedangkan Majapahit pada abad ke-13 hingga ke-15 M membangun hegemoni maritim melalui penguasaan Laut Jawa, Selat Makassar, dan jaringan pelabuhan Nusantara. Meskipun berkembang pada ruang geografis dan periode yang berbeda, ketiga peradaban tersebut menunjukkan kesamaan dalam memanfaatkan posisi strategis jalur pelayaran sebagai instrumen politik, ekonomi, dan pertahanan.

Berbagai penelitian mengenai Parthia, Sriwijaya, maupun Majapahit selama ini umumnya dilakukan secara terpisah sesuai kawasan dan periodenya masing-masing. Kajian mengenai Parthia lebih banyak menyoroti hubungan dengan Romawi dan Jalur Sutra, sedangkan penelitian mengenai Sriwijaya dan Majapahit berfokus pada perkembangan kerajaan maritim Nusantara. Akibatnya, belum banyak penelitian yang membandingkan ketiga peradaban tersebut dalam satu kerangka geopolitik maritim untuk mengidentifikasi pola umum pembangunan pangkalan laut sebagai instrumen kekuasaan negara.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis persamaan dan perbedaan strategi maritim Parthia, Sriwijaya, dan Majapahit melalui tiga variabel utama, yaitu penguasaan *maritime chokepoint*, fungsi pangkalan laut sebagai instrumen geopolitik, serta hubungan antara kekuatan ekonomi dengan perlindungan militer di laut. Penelitian menggunakan pendekatan sejarah komparatif yang dipadukan dengan perspektif geografi militer dan analisis multidisipliner terhadap sumber arkeologis, epigrafis, tekstual, serta literatur sejarah maritim.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga peradaban memiliki pola geopolitik yang serupa, yaitu membangun infrastruktur maritim permanen di kawasan strategis untuk mengendalikan arus perdagangan, memperkuat proyeksi kekuatan militer, dan memperoleh keuntungan fiskal. Perbedaannya terletak pada model kekuasaan yang dikembangkan. Parthia menitikberatkan pertahanan pesisir, Sriwijaya menerapkan sistem *thalassocracy*, sedangkan Majapahit mengombinasikan kekuatan agraris dan maritim dalam membangun hegemoni kawasan. Temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa pangkalan laut merupakan bagian dari tradisi strategi geopolitik yang telah berkembang sejak masa kuno serta menjadi landasan penting bagi pengembangan kajian arkeologi pertahanan di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Chokepoint Maritim dalam Perspektif Geopolitik

Konsep *maritime chokepoint* mengacu pada jalur laut sempit yang menjadi lintasan utama pelayaran internasional sehingga memiliki nilai strategis bagi perdagangan maupun pertahanan. Penguasaan terhadap kawasan ini memungkinkan suatu negara mengendalikan arus perdagangan, mobilitas militer, dan distribusi sumber daya ekonomi. Alfred Thayer Mahan (1890) menegaskan bahwa kekuatan laut merupakan unsur utama dalam membangun dominasi geopolitik, sedangkan Corbett (1911) menekankan bahwa penguasaan jalur komunikasi laut lebih penting dibandingkan kemenangan dalam pertempuran laut semata.

Dalam sejarah dunia, prinsip tersebut telah diterapkan jauh sebelum dirumuskan secara teoritis. Peradaban Fenisia, Yunani, Romawi, maupun Persia memanfaatkan selat dan pelabuhan strategis sebagai pusat pengendalian perdagangan internasional. Dengan demikian, *chokepoint* tidak hanya berfungsi sebagai jalur pelayaran, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi, militer, dan politik yang menentukan posisi suatu negara dalam sistem perdagangan global.

Pangkalan Laut sebagai Instrumen Geopolitik

Dalam kajian sejarah militer, pangkalan laut merupakan pusat operasi maritim yang mendukung logistik, pemeliharaan armada, komando operasi, pengawasan pelayaran, pemungutan bea perdagangan, serta proyeksi kekuatan ke wilayah strategis. Till (2009) menjelaskan bahwa keberadaan pangkalan memungkinkan negara mempertahankan kehadiran militer secara berkelanjutan pada jalur pelayaran penting.

Berbagai penelitian mengenai pangkalan laut kuno di kawasan Mediterania menunjukkan bahwa lokasi pangkalan selalu berkaitan dengan kepentingan geopolitik. Oleh karena itu, temuan pangkalan Parthia di Minab tidak dapat dipandang sebagai fasilitas pelabuhan biasa, melainkan sebagai bagian dari strategi negara dalam mengendalikan Selat Hormuz. Kerangka analisis yang sama dapat digunakan untuk memahami sistem maritim Sriwijaya dan Majapahit.

Parthia dalam Sistem Perdagangan Maritim

Kekaisaran Parthia (247 SM–224 M) merupakan kekuatan utama Asia Barat yang menghubungkan perdagangan antara Romawi, India, dan Tiongkok. Posisi geografis tersebut menjadikan Parthia memperoleh keuntungan sebagai perantara Jalur Sutra darat maupun laut.

Temuan arkeologi di Minab memperkuat dugaan bahwa Parthia tidak hanya menguasai perdagangan melalui diplomasi, tetapi juga membangun infrastruktur pertahanan permanen untuk mengawasi Selat Hormuz. Dengan demikian, pangkalan laut berfungsi sebagai sarana pengendalian perdagangan sekaligus perlindungan terhadap kepentingan ekonomi negara.

Sriwijaya sebagai Thalassocracy

Sriwijaya berkembang sebagai kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara pada abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Berbeda dengan kerajaan agraris, kekuatan Sriwijaya bertumpu pada penguasaan Selat Malaka dan Selat Sunda sebagai jalur perdagangan internasional. Model kekuasaan ini dikenal sebagai *thalassocracy*, yaitu negara yang membangun dominasi melalui penguasaan laut dan jaringan pelabuhan.

Prasasti Kedukan Bukit, Talang Tuo, dan Kota Kapur menunjukkan adanya organisasi politik dan militer yang mendukung pengendalian kawasan maritim. Selain itu, catatan I-Tsing memperlihatkan bahwa Sriwijaya menjadi pusat perdagangan sekaligus pusat pembelajaran agama Buddha yang ramai dikunjungi pelayar internasional.

Hegemoni Maritim Majapahit

Majapahit mengembangkan pola kekuasaan yang berbeda dengan Sriwijaya. Selain memiliki basis agraris yang kuat di Jawa Timur, Majapahit juga membangun jaringan pelabuhan yang menghubungkan wilayah Nusantara melalui Laut Jawa, Selat Makassar, dan jalur pelayaran menuju kawasan timur Indonesia.

Nagarakertagama dan Pararaton menggambarkan luasnya wilayah pengaruh Majapahit, sedangkan catatan Ma Huan menunjukkan pentingnya pelabuhan-pelabuhan Jawa dalam perdagangan internasional. Sistem tersebut memungkinkan Majapahit mengintegrasikan kepentingan politik, ekonomi, dan militer dalam satu jaringan maritim yang saling mendukung.

Arkeologi Pertahanan Maritim

Penelitian mengenai arkeologi maritim di Indonesia masih lebih banyak berfokus pada pelabuhan perdagangan, candi, maupun artefak keagamaan. Bukti fisik mengenai pangkalan angkatan laut Sriwijaya maupun Majapahit masih sangat terbatas dibandingkan temuan Minab di Iran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penelitian arkeologi pertahanan di Indonesia masih memiliki ruang pengembangan yang luas, terutama melalui eksplorasi kawasan muara sungai, pesisir, dan pelabuhan kuno yang diduga menjadi pusat aktivitas militer maritim.

Posisi Penelitian

Berdasarkan telaah pustaka, terdapat tiga kesenjangan penelitian. Pertama, belum terdapat kajian yang membandingkan Parthia, Sriwijaya, dan Majapahit dalam satu kerangka geopolitik maritim. Kedua, temuan arkeologi Minab belum banyak dikaitkan dengan perkembangan sejarah maritim Nusantara. Ketiga, belum tersedia model konseptual yang menjelaskan pangkalan laut sebagai instrumen geopolitik lintas peradaban.

Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan pendekatan sejarah komparatif yang memadukan perspektif geopolitik, geografi militer, dan arkeologi pertahanan untuk menjelaskan pola universal pembangunan pangkalan laut pada tiga peradaban maritim besar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode sejarah komparatif (*comparative historical research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan membandingkan tiga peradaban maritim yang berkembang pada ruang geografis dan periode sejarah yang berbeda untuk mengidentifikasi pola geopolitik yang memiliki karakteristik serupa. Perbandingan dilakukan bukan untuk menjelaskan hubungan kausal antarkasus, melainkan untuk menguji adanya kesamaan struktural dalam pembangunan infrastruktur maritim sebagai instrumen kekuasaan.

Kerangka analisis memadukan tiga pendekatan, yaitu sejarah komparatif, geografi militer, dan analisis multidisipliner. Pendekatan sejarah komparatif digunakan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan strategi maritim Parthia, Sriwijaya, dan Majapahit berdasarkan variabel yang sama. Pendekatan geografi militer digunakan untuk menjelaskan pengaruh posisi geografis terhadap penempatan pangkalan laut dan penguasaan *maritime chokepoint*. Sementara itu, pendekatan multidisipliner mengintegrasikan perspektif sejarah, arkeologi, geopolitik, dan ilmu pertahanan agar interpretasi yang dihasilkan lebih komprehensif.

Objek penelitian meliputi tiga peradaban maritim, yaitu Kekaisaran Parthia (247 SM–224 M),

Kekaisaran Sriwijaya (abad ke-7 hingga ke-13 M), dan Kekaisaran Majapahit (abad ke-13 hingga ke-15 M). Ketiga kasus dibandingkan menggunakan tiga variabel utama, yaitu: (1)

penguasaan *maritime chokepoint*, (2) fungsi pangkalan laut sebagai instrumen geopolitik, dan (3) hubungan antara kekuatan ekonomi dengan perlindungan militer di laut.

Sumber data terdiri atas sumber primer, sekunder, dan kartografis. Sumber primer meliputi laporan arkeologi Minab, prasasti Sriwijaya, Nagarakertagama, Pararaton, serta catatan perjalanan I-Tsing dan Ma Huan. Sumber sekunder berupa buku, artikel ilmiah, dan hasil penelitian mengenai sejarah maritim, geopolitik, serta arkeologi pertahanan. Sementara itu, data kartografis digunakan untuk menjelaskan posisi relatif Selat Hormuz, Selat Malaka, Laut Jawa, dan Selat Makassar dalam jaringan Jalur Sutra Maritim.

Analisis dilakukan melalui empat tahapan, yaitu heuristik, kritik sumber, analisis per kasus (*within-case analysis*), dan analisis komparatif (*cross-case analysis*). Setiap peradaban dianalisis terlebih dahulu sesuai konteks historisnya, kemudian dibandingkan untuk menemukan pola kesamaan maupun perbedaannya. Seluruh temuan selanjutnya disintesis menjadi argumentasi mengenai fungsi pangkalan laut sebagai instrumen geopolitik dalam peradaban maritim.

Untuk menjaga validitas penelitian, diterapkan triangulasi sumber melalui perbandingan bukti arkeologis, tekstual, dan geografis. Klaim yang memiliki dukungan bukti terbatas disampaikan sebagai hipotesis penelitian, sedangkan temuan yang didukung oleh lebih dari satu jenis sumber digunakan sebagai dasar penyusunan kesimpulan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya menghasilkan analisis yang proporsional sekaligus memberikan dasar konseptual bagi pengembangan kajian arkeologi pertahanan maritim di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan Arkeologi Minab sebagai Bukti Geopolitik Maritim

Penemuan situs pangkalan angkatan laut di Minab, Provinsi Hormozgan, Iran, memberikan bukti baru mengenai perkembangan strategi maritim Kekaisaran Parthia. Struktur benteng, pelabuhan kuno, dan bekas teluk menunjukkan bahwa kawasan tersebut dirancang sebagai infrastruktur militer permanen untuk mengawasi Selat Hormuz. Lokasi tersebut dipilih karena memiliki nilai strategis dalam mengendalikan jalur pelayaran antara Teluk Persia dan

Samudra Hindia, sehingga memungkinkan negara mengawasi arus perdagangan sekaligus mempertahankan kepentingan politik dan ekonomi.

Berbeda dengan pelabuhan dagang yang berorientasi pada aktivitas komersial, pangkalan Minab lebih menunjukkan fungsi pertahanan dan pengawasan. Keberadaannya memungkinkan Parthia mempertahankan kontrol terhadap kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz, menerapkan sistem pemungutan bea, serta memperkuat proyeksi kekuatan militer di kawasan. Dengan demikian, temuan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pangkalan laut telah menjadi bagian dari strategi geopolitik sejak masa kuno.

Perbandingan Strategi Maritim Parthia, Sriwijaya, dan Majapahit

Analisis komparatif menunjukkan bahwa Parthia, Sriwijaya, dan Majapahit memiliki pola strategi yang relatif serupa meskipun berkembang pada ruang dan waktu yang berbeda. Ketiga peradaban sama-sama membangun kekuatan maritim melalui penguasaan jalur pelayaran strategis (*maritime chokepoint*) sebagai sarana mengendalikan perdagangan internasional.

Parthia mengonsentrasikan kekuatan pada Selat Hormuz sebagai pintu masuk Teluk Persia. Penguasaan kawasan tersebut memungkinkan Parthia mengendalikan distribusi komoditas dari India dan Tiongkok menuju Romawi. Sebaliknya, Sriwijaya membangun sistem *thalassocracy* dengan menjadikan Selat Malaka dan Selat Sunda sebagai pusat jaringan perdagangan Asia Tenggara. Keunggulan Sriwijaya tidak hanya terletak pada kemampuan militernya, tetapi juga

pada kemampuannya mengintegrasikan fungsi pelabuhan, perdagangan, diplomasi, dan agama sebagai sumber legitimasi politik.

Majapahit memperlihatkan pola yang berbeda. Sebagai kerajaan agraris-maritim, Majapahit tidak hanya menguasai satu titik strategis, tetapi membangun jaringan pelabuhan di sepanjang pantai utara Jawa yang terhubung dengan Laut Jawa, Selat Makassar, serta wilayah Indonesia bagian timur. Sistem tersebut memungkinkan Majapahit mempertahankan dominasi perdagangan sekaligus memperluas pengaruh politik di kawasan Nusantara.

Perbedaan utama ketiga peradaban terletak pada model kekuasaannya. Parthia menerapkan strategi pertahanan pesisir (*coastal defence*), Sriwijaya mengembangkan negara maritim (*thalassocracy*), sedangkan Majapahit mengombinasikan kekuatan agraris dan maritim dalam membangun hegemoni regional. Walaupun demikian, ketiganya memperlihatkan prinsip yang sama, yaitu bahwa penguasaan jalur pelayaran merupakan fondasi utama stabilitas politik dan ekonomi.

Pangkalan Laut sebagai Instrumen Geopolitik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pangkalan laut pada ketiga peradaban memiliki fungsi yang jauh lebih luas dibandingkan sekadar tempat berlabuh armada. Infrastruktur tersebut menjadi pusat logistik, pengawasan, pertahanan, dan administrasi perdagangan yang mendukung keberlangsungan kekuasaan negara.

Pada Parthia, pangkalan Minab berfungsi sebagai pusat pengawasan Selat Hormuz sehingga memungkinkan negara mengendalikan lalu lintas kapal dan melindungi jalur perdagangan.

Sriwijaya menerapkan sistem yang lebih terdesentralisasi melalui jaringan pelabuhan dan pos pengawasan di sepanjang Selat Malaka. Sementara itu, Majapahit memanfaatkan jaringan pelabuhan pesisir sebagai basis mobilisasi armada, distribusi logistik, dan pengendalian perdagangan antarpulau.

Kesamaan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pangkalan laut merupakan bentuk investasi strategis yang mendukung keberlanjutan kekuasaan politik. Infrastruktur maritim tidak hanya memperkuat kemampuan militer, tetapi juga meningkatkan efektivitas pengelolaan perdagangan dan administrasi negara.

Hubungan Kekuatan Ekonomi dan Militer Maritim

Perbandingan ketiga peradaban memperlihatkan adanya hubungan erat antara kekuatan ekonomi dan kemampuan militer di laut. Aktivitas perdagangan internasional hanya dapat berkembang apabila didukung oleh sistem keamanan yang mampu menjamin keselamatan pelayaran dan stabilitas jalur perdagangan.

Parthia memperoleh keuntungan ekonomi melalui penguasaan Selat Hormuz dan sistem pemungutan bea atas perdagangan internasional. Sriwijaya membangun kemakmuran melalui pengendalian perdagangan transit di Selat Malaka, sedangkan Majapahit mengembangkan sistem distribusi komoditas Nusantara melalui jaringan pelabuhan yang terintegrasi.

Ketiga contoh tersebut menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi maritim tidak dapat dipisahkan dari kemampuan negara dalam mempertahankan keamanan jalur pelayaran. Dengan kata lain, pertahanan laut bukan sekadar instrumen militer, melainkan juga merupakan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik.

Implikasi terhadap Arkeologi Pertahanan Indonesia

Temuan Minab memberikan perspektif baru bagi penelitian sejarah maritim Indonesia. Selama ini penelitian mengenai Sriwijaya dan Majapahit lebih banyak berfokus pada aspek

perdagangan, politik, maupun kebudayaan, sedangkan kajian mengenai infrastruktur pertahanan maritim masih relatif terbatas.

Pendekatan komparatif dalam penelitian ini menunjukkan bahwa apabila Parthia memiliki pangkalan laut permanen untuk mengendalikan Selat Hormuz, maka besar kemungkinan Sriwijaya dan Majapahit juga mengembangkan infrastruktur serupa di kawasan strategis Nusantara. Kawasan Sungai Musi, Muara Jambi, Tuban, Gresik, Sedayu, maupun sejumlah pelabuhan kuno lainnya menjadi lokasi yang layak diprioritaskan dalam penelitian arkeologi pertahanan.

Meskipun hingga saat ini belum ditemukan bukti arkeologis yang setara dengan situs Minab, keberadaan prasasti, kronik asing, serta karakteristik geografis kawasan memberikan dasar yang kuat untuk mengembangkan hipotesis tersebut. Oleh karena itu, penelitian lanjutan melalui survei arkeologi darat maupun bawah air diperlukan guna mengidentifikasi kemungkinan keberadaan pangkalan laut permanen di wilayah bekas kekuasaan Sriwijaya dan Majapahit.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pangkalan laut telah menjadi bagian penting dari strategi geopolitik maritim sejak masa kuno. Analisis komparatif terhadap Kekaisaran Parthia, Sriwijaya, dan Majapahit memperlihatkan bahwa ketiga peradaban membangun infrastruktur maritim pada lokasi yang memiliki nilai strategis untuk mengendalikan jalur pelayaran, melindungi kepentingan ekonomi, serta memperkuat proyeksi kekuatan militer.

Temuan arkeologi pangkalan laut Parthia di Minab memberikan bukti fisik bahwa penguasaan Selat Hormuz didukung oleh pembangunan fasilitas militer permanen. Meskipun bukti arkeologis yang setara belum ditemukan pada Sriwijaya dan Majapahit, sumber epigrafis, kronik asing, serta karakteristik geografis menunjukkan bahwa kedua kerajaan tersebut juga mengembangkan sistem pertahanan maritim yang terintegrasi dengan jaringan perdagangan internasional.

Perbandingan ketiga peradaban menunjukkan adanya pola geopolitik yang bersifat universal. Penguasaan *maritime chokepoint*, pembangunan pangkalan laut, serta keterkaitan antara kekuatan ekonomi dan pertahanan merupakan unsur yang secara konsisten mendukung keberlangsungan negara maritim. Perbedaannya terletak pada model implementasi. Parthia berorientasi pada pertahanan pesisir, Sriwijaya membangun sistem *thalassocracy* berbasis perdagangan laut, sedangkan Majapahit mengembangkan model hibrida yang memadukan kekuatan agraris dan maritim.

Temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa pangkalan laut bukan sekadar fasilitas militer, tetapi merupakan instrumen geopolitik yang berfungsi menjaga keamanan jalur perdagangan, meningkatkan pendapatan negara, memperluas pengaruh politik, dan mempertahankan stabilitas kawasan. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur maritim dapat dipahami sebagai indikator penting tingkat organisasi dan kapasitas strategis suatu negara maritim.

Selain memberikan kontribusi terhadap kajian sejarah maritim, penelitian ini juga memperluas perspektif arkeologi pertahanan di Indonesia melalui penggunaan pendekatan sejarah komparatif lintas kawasan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa analisis terhadap temuan arkeologi di luar Indonesia dapat menjadi kerangka konseptual dalam mengidentifikasi kemungkinan keberadaan pangkalan laut kuno di wilayah bekas kekuasaan Sriwijaya maupun Majapahit.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, seluruh analisis disusun berdasarkan data arkeologis dan literatur yang telah dipublikasikan sehingga belum didukung oleh penelitian lapangan secara langsung. Kedua, ketersediaan bukti arkeologis pada ketiga kasus belum seimbang karena temuan fisik pangkalan laut baru terkonfirmasi pada kasus Parthia, sedangkan Sriwijaya dan Majapahit masih didasarkan pada bukti tekstual, epigrafis, serta interpretasi geografis. Oleh karena itu, kesimpulan mengenai dua kerajaan Nusantara disampaikan sebagai interpretasi ilmiah yang masih memerlukan verifikasi lebih lanjut melalui penelitian arkeologi.

Rekomendasi

Penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan kajian arkeologi pertahanan maritim melalui survei darat maupun bawah air di kawasan yang diduga menjadi pusat aktivitas militer Sriwijaya dan Majapahit, seperti Palembang, Muara Jambi, Tuban, Gresik, dan wilayah pesisir lainnya. Integrasi metode arkeologi, geospasial, geofisika, dan sejarah maritim diharapkan mampu menghasilkan bukti empiris mengenai keberadaan pangkalan laut kuno di Nusantara.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Budi Utomo. (2010). *Kerajaan-Kerajaan Maritim Nusantara*. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.
- Bloch, M. (1928). Pour une histoire comparée des sociétés européennes. *Revue de Synthèse Historique*, 46, 15–50.
- Braudel, F. (1979). *Civilization and Capitalism, 15th–18th Century, Volume I: The Structures of Everyday Life*. New York: Harper & Row.
- Casson, L. (1991). *The Ancient Mariners* (2nd ed.). Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Christie, J. W. (1998). Javanese Markets and the Asian Sea Trade Boom of the Tenth to Thirteenth Centuries A.D. *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, 41(3), 344–381.
- Coedès, G. (1968). *The Indianized States of Southeast Asia*. Honolulu: East-West Center Press.
- Corbett, J. S. (1911). *Some Principles of Maritime Strategy*. London: Longmans, Green and Co.
- Curtis, V. S., & Stewart, S. (Eds.). (2007). *The Age of the Parthians*. London: I.B. Tauris.
- Debevoise, N. C. (1938). *A Political History of Parthia*. Chicago: University of Chicago Press.
- Energy Information Administration. (2024). *The Strait of Hormuz Is the World's Most Important Oil Transit Chokepoint*. U.S. Energy Information Administration.
- Hall, K. R. (1985). *Maritime Trade and State Development in Early Southeast Asia*. Honolulu: University of Hawai'i Press.
- Hale, J. R. (2009). *Lords of the Sea: The Epic Story of the Athenian Navy and the Birth of Democracy*. New York: Viking.
- Kulke, H. (2016). *A History of India* (6th ed.). London: Routledge.
- Mahan, A. T. (1890). *The Influence of Sea Power upon History, 1660–1783*. Boston: Little, Brown and Company.
- Manguin, P.-Y. (2004). The Archaeology of Early Maritime Polities of Southeast Asia. In I. Glover & P. Bellwood (Eds.), *Southeast Asia: From Prehistory to History* (pp. 282–313). London: RoutledgeCurzon.
- Muljana, S. (2006). *Menuju Puncak Kemegahan: Sejarah Kerajaan Majapahit*. Yogyakarta: LKiS.
- Munoz, P. M. (2006). *Early Kingdoms of the Indonesian Archipelago and the Malay Peninsula*. Singapore: Editions Didier Millet.
- Skocpol, T., & Somers, M. (1980). The Uses of Comparative History in Macrosocial Inquiry. *Comparative Studies in Society and History*, 22(2), 174–197.

- Tehran Times. (2026). *Ancient Parthian Naval Base Discovered near Minab in Hormozgan Province*. Tehran Times.
- Till, G. (2009). *Seapower: A Guide for the Twenty-First Century* (2nd ed.). London: Routledge.
- Wolters, O. W. (1967). *Early Indonesian Commerce: A Study of the Origins of Srivijaya*. Ithaca, NY: Cornell University Press.